

# Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik Di Kabuapen/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

*by Wahyu Nadi*

---

**Submission date:** 12-Mar-2022 06:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1782613030

**File name:** Jurnal\_Kompetitif\_Vol\_5\_No\_2\_2019.pdf (884.1K)

**Word count:** 4494

**Character count:** 27161

**Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik  
Di Kabuapen/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Wahyunadi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Email: [Nadi\\_zaz@yahoo.com](mailto:Nadi_zaz@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to measure regional financial management related to the achievement of development targets through measuring performance and efficiency of the public sector.*

*The method of analysis in this study is to measure the performance of the public sector and the efficiency of the public sector by using the method of Public sector performance (PSP) and Public sector efficiency (PSE).*

*The results of the calculation of public sector performance (PSP) and public sector efficiency (PSE) in districts in West Nusa Tenggara show that using social indicators namely health and education while the standard indicators of Musgrave are distribution, stabilization and economic performance. District which has the highest total indicator value of Public Sector Performance (PSP) is Mataram City followed by West Lombok Regency and West Sumbawa Regency. Districts that have the highest indicator of the total value of the Public Sector Efficiency (PSE) are Sumbawa Regency and Mataram City followed by North Lombok Regency. Whereas the District with the lowest total indicator of the Public Sector Efficiency (PSE) is Dompu Regency.*

*Keywords: Fiscal decentralization, Public sector efficiency (PSE),  
Public sector performance (PSP).*

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi fiskal merupakan konsep dalam otonomi daerah untuk mengatur kemandirian lokal suatu daerah dalam mengurus berbagai macam urusan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan daerah yang akhirnya dapat merangsang pembangunan di daerah-daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda di setiap daerah karena karakteristik daerah yang bervariasi.

Salah satu kebijakan pemerintah yang erat kaitannya dengan upaya mobilisasi faktor produksi adalah melalui kebijaksanaan fiskal. Dalam manajemen ekonomi modern kebijaksanaan fiskal mengandung tiga tujuan utama yaitu; *Pertama* adalah mempengaruhi alokasi sumber-sumber ekonomi (*resource allocation*). Tujuan kebijaksanaan fiskal dalam konteks ini adalah untuk menemukan keseimbangan yang tepat baik dalam bentuk riil maupun nominal diantara alokasi sumber-sumber ekonomi untuk sektor publik dan *opportunity cost* pengalihan sumber-sumber ekonomi dari

pengusaha pihak swasta. *Kedua*, adalah untuk melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk memperoleh keseimbangan antar individu (*interpersonal balance*) dalam pendapatan bersih atau kesejahteraan. *Ketiga*, adalah untuk menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu kebijaksanaan fiskal harus mampu merencanakan tindakan-tindakan yang akan melancarkan pemanfaatan secara optimal sumberdaya-sumberdaya seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber keuangan.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dengan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan<sup>1</sup>.

Sekarang ini kinerja instansi pemerintah telah banyak mendapat sorotan, dikarenakan masyarakat mulai menanyakan manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan yaitu berupa anggaran berbasis kinerja.

Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik. Penyediaan layanan publik ini merupakan salah satu wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan tersebut didasarkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri. Sehingga terjadi efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

Kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar yang seperti: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung terhadap tingkat kemiskinan di dalam masyarakat<sup>2</sup>. Dalam memenuhi penyediaan layanan publik kepada masyarakat pemerintah perlu

<sup>1</sup> Bastian, Indra. 2006. Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

<sup>2</sup> Von Braun, J. and U. Grote. 2002. *Does Decentralization Serve the Poor? In Managing Fiscal Decentralization* ed. E. Ahmad, and V. Tanzi. London and New York: Routledge.

memperhatikan aspek efisiensi yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya (keuangan daerah) yang dimilikinya secara akurat dan optimal. Proyek penyediaan fasilitas publik haruslah melalui sebuah kajian terkait analisis biaya-manfaat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan publik dapat memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta diterapkannya anggaran berbasis kinerja, maka prestasi daerah semestinya tidak hanya dinilai dari kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah saja tetapi harus juga diperhatikan kemampuan daerah dalam mengeksalarasi pencapaian sasaran pembangunan. Oleh karena itu peneliti menganggap perlu untuk melakukan pengukuran terhadap prestasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan melalui pengukuran kinerja dan efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor publik di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengeluaran Pemerintah dan Pelayanan Publik**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal. Dalam arti luas kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengalokasian dan pengaturan komposisi pengeluaran namun berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah membiayai pengeluaran tersebut. Pembiayaan pengeluaran pemerintah dapat bersumber dari : (i). pajak, (ii). pinjaman atau penjualan obligasi, (iii). pencetakan uang (seignorage), dan (iv). penjualan aset pemerintah (privatisasi). Rosen (1989), menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan utama pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengenaan jenis pajak tertentu akan berpengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi<sup>3</sup>. Jika pemerintah mengenakan pajak lump-sum kepada masyarakat maka pengaruhnya terhadap investasi dan pertumbuhan adalah positif tetapi jika pajak yang dikenakan adalah pajak pendapatan maka akan dapat menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>3</sup> Zehavi A., Rosen D. 1989. A new species of *Aphelinus* (Hymenoptera: Aphelinidae) from Israel, with notes on the mali group. *Israel Journal of Entomology*

Wagner dalam Stiglitz (2000) menguraikan mengenai porsi pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP<sup>4</sup>. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Pandangan Wagner tersebut berdasarkan teori organik mengenai pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Pandangannya ini dikenal sebagai Hukum Wagner yaitu Hukum Aktivitas Pemerintah yang selalu Meningkatkan (*The Law of Ever Increasing State Activity*) sementara oleh Richard A. Musgrave menyebutnya sebagai Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu Meningkatkan (*The Law of Growing Public Expenditure*).

### **Pembangunan Bidang Pendidikan**

Keunggulan suatu bangsa atau daerah tidak lagi semata-mata bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu bangsa atau daerah karena bangsa atau daerah yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang sangat baik. Jika suatu negara atau daerah mempunyai generasi penerus yang cerdas pasti para penerus akan memperbaiki pembangunan terhadap negara daerah. Pendidikan sangatlah penting untuk menentukan kedudukan suatu negara atau daerah, ilmu pengetahuan teknologi suatu negara atau daerah juga mempengaruhi kemajuan negara atau daerah tersebut.

### **Pembangunan Bidang Kesehatan**

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dari kehidupan seseorang. Kesehatan telah menjadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan hendaknya tidak hanya berfokus terhadap pembangunan fisik saja. Anggaran kesehatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah

---

<sup>4</sup> Stiglitz, Joseph E. 2003. *Economics of the Public Sector*, Third Edition, Norton McGraw-Hill.

<sup>14</sup> hendaknya mampu digunakan seoptimal mungkin bagi peningkatan kesehatan terutama bagi yang kurang mapu atau miskin. <sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Schultz dan Denison (1960-1962) menunjukkan bahwa 20% pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat untuk beberapa dasa warsa disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan. Sementara perbaikan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan tingkat partisipasi dan produktivitas tenaga kerja serta tingkat partisipasi pendidikan yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

<sup>5</sup> Implikasi kebijakan dibidang kesehatan bahwa apabila jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat diperluas maka kemungkinan besar hasil (output) akan bertambah besar dan perekonomian suatu wilayah akan bertambah baik (Malenbaum, 1970). Sementara Cesario, Simon dan Keane (1980) menyatakan bahwa program-program kesehatan dan gizi akan berpengaruh terhadap prduktivitas yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian verifikatif yang bertujuan untuk mengkaji teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menyusun hubungan antar variabel.

### **Daerah/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di seluruh daerah kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa anggaran pemerintah pada setiap daerah kabupaten/kota memiliki besaran yang berbeda-beda. dan tingkat prioritas kebijakan pembangunan memiliki karakteristik yang berbeda-beda (heterogen).

### **Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyusun matrik variabel-variabel yang diperlukan sesuai dengan model analisis. Pengumpulan data akan dilakukan dari berbagai sumber untuk dapat saling melengkapi kekurangan satu dengan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* dan data *cross-section* antar kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sumber data yang akan digunakan diharapkan dapat terpenuhi dari beberapa publikasi resmi dan website lembaga atau badan milik pemerintah seperti :Badan Pusat Statistik (BPS) danPemerintah Daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat

### Variabel Penelitian

Untuk kebutuhan analisis maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Variabel Sosial Ekonomi yang terdiri dari :
  - a. Kesehatan : Tingkat kematian Bayi, Tingkat Harapan Hidup.
  - b. Pendidikan : enrolment sekolah dasar, enrolment SLTP
2. Variabel Standar Musgravian terdiri dari :
  - a. Distribusi : share pendapatan 40 persen rumah tangga termiskin
  - b. Stabilitas : stabilitas pertumbuhan PDRB (koefisien variasi)
  - c. Kinerja Ekonomi : PDRB per kapita, Pertumbuhan PDRB, Pengangguran.

### Prosedur Analisis

Merujuk pada model pengukuran yang dilakukan oleh Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2003), penelitian ini akan mengukur kinerja sektor publik dan efisiensi sektor publik dengan menggunakan metode *Public sector performance (PSP)* dan *Public sector efficiency (PSE)*.

Nilai PSP tergantung pada indikator-indikator kinerja ekonomi tertentu, yang terdiri dari indikator “musgravianstandard” dan variabel sosio ekonomi (I)

$$PSP_i = \sum_{j=1}^n PSP_{ij}$$

Di mana:

i : unit pemerintah i atau dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah i

j : kinerja unit pemerintah pada sektor j atau dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah pada sektor j

Nilai PSP merupakan fungsi dari berbagai kinerja sosio ekonomi

$$PSP_i = f(I_i)$$

Di mana :

i: indikatr “musgravian” standar dan variabel sosio ekonomi

k : indikator-indikator dalam masing-masing variabel sosio-ekonomi

Oleh karena itu, perubahan pada *public sector performance*, tergantung pada perubahan nilai-nilai indikator sosio-ekonomi yang relevan, atau dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$\Delta PSP_{ij} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial F}{\partial I} \Delta I_k$$

Untuk menaksir PSP penelitian ini menggunakan 5 sub indikator kinerja publik yaitu kesehatan, pendidikan, distribusi, stabilitas dan kinerja ekonomi. Dua sub indikator pertama adalah indikator sosio-ekonomi. Sedangkan tiga indikator berikutnya adalah indikator kinerja yang mengacu pada indikator kinerja publik Musgrave (Standard Musgravian Indicators).

Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2, indikator efisiensi sektor publik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PSE_i = \frac{PSP_i}{PEX_i}$$

$$\frac{PSP_i}{PEX_i} = \sum_{j=1}^n \frac{PSP_{ij}}{PEX_{ij}}$$

Marginal productivity dari pengeluaran publik bernilai positif dan menurun maka,

$$\frac{\partial PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}} > 0, \frac{\partial^2 PSE_{ij}}{\partial^2 PEX_{ij}} < 0$$

Dimana :

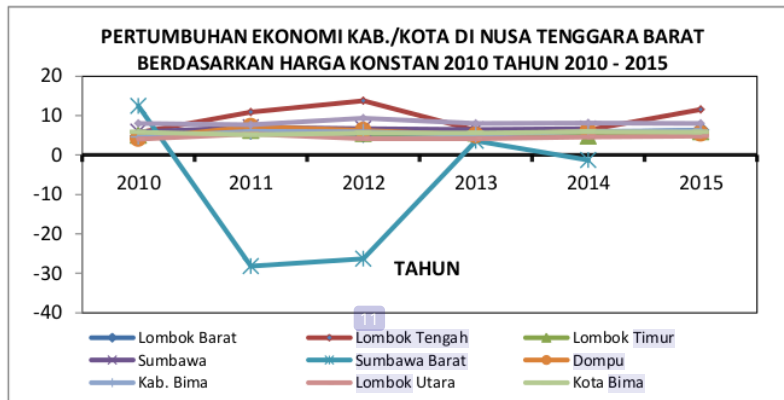
PEX : Rata-rata pengeluaran publik (normalisasi).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat sangat bervariasi, selain dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam (*faktor endowment*) juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur di daerah dan kebijakan pemerintah. Daerah-daerah yang memiliki infrastruktur relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain akan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan proses transformasi sebagai hasil pembangunan nasional ataupun regional.





Sumber : Data BPS diolah.

Gambar : 1.

Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2015

Selama periode pengamatan 2010-2015 pertumbuhan ekonomi daerah mengalami fluktuasi. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan terdapat sejumlah daerah tumbuh dibawah rata-rata provinsi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi selama periode 2010-2015 mencapai 6,75 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai kabupaten Sumbawa Barat mencapai 11,22 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di kabupaten Lombok Utara hanya sebesar 4,48%. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu : Kota Mataram mencapai 8,17%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 9,06 % dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 11,22.

#### **Pengeluaran Pemerintah Daerah**

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah Undang-Undang Otonomi Daerah secara garis besar pola pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting di dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan walaupun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, namun strategi dan arah kebijaksanaan pengeluaran rutin berpengaruh luas di dalam menunjang tercapainya sasaran pembangunan melalui peranannya mendukung

kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### Variabel Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pendidikan dapat dilihat dari kemampuan baca tulis (melek huruf) dan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi tingkat melek huruf penduduk suatu daerah, maka semakin berhasil pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Angka melek huruf pada kelompok umur 10 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 mencapai sekitar 88,68%. Jika dirinci menurut komposisi jenis kelamin, kemampuan baca tulis penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Kemampuan baca tulis laki-laki sekitar 92,32%, sedangkan perempuan adalah 85,35%. Dengan kata lain, perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan laki-laki.

**Tabel 1. Angka Melek Huruf di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2009 -2016.**

Provinsi	Tahun							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NTB	80.18	81.05	83.24	83.68	87.19	88.64	88.66	88.68
Nasional	92.58	92.91	92.99	93.25	93.92	95.12	95.12	95.81

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Data di atas memperlihatkan bahwa angka melek huruf dari tahun ke tahun terus meningkat. Angka Melek Huruf di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah daripada rata-rata nasional artinya penduduk yang buta huruf di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Indikator pendidikan yang lain adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

**Tabel 2. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016.**

	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-Rata Lama Sekolah	6.07	6.33	6.54	6.67	6.71	6.79

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

## **Variabel Kesehatan**

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yakni lingkungan, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan. Indikator utama derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat antara lain dari angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu (AKI), angka morbiditas beberapa penyakit dan status gizi.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan. Masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan, cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi sehingga memiliki kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh kasus atau angka kematian bayi. Apabila melihat trend angka kematian bayi yang cenderung menurun, maka diperkirakan AHH NTB akan mengalami peningkatan.

Jumlah kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung fluktuatif, namun apabila dicermati lebih lanjut, dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kematian ibu cenderung menurun. Pada tahun 2016, jumlah kematian ibu terbanyak berada di Kabupaten Lombok Tengah dengan 26 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kematian ibu banyak terjadi pada usia 20-34 tahun sebanyak 63,04%, usia  $\geq 35$  tahun sebanyak 28,26% dan usia  $< 20$  tahun sebanyak 8,70%.

## **Analisis Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik**

### **1. Public Sector Performance (PSP)**

Untuk memperoleh nilai indikator Kinerja Sektor Publik (Public Sector Performance = PSP) dilakukan perhitungan dengan formulasi sesuai dengan yang diuraikan dalam metode. Hasil perhitungan nilai indikator Kinerja Sektor Publik

masing-masing daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 3. Public Sector Performance (PSP) Indikator Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.**

No	Kab/Kota	Sosial indikator		Musgravian Indikator			PSP
		Pendidikan	Kesehatan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Lombok Barat	1.85	1.03	0.91	0.11	1.80	1.14
2	Lombok Tengah	1.12	0.99	1.01	0.09	1.39	0.92
3	Lombok Timur	1.61	1.10	0.83	0.55	1.10	1.04
4	Sumbawa	0.86	1.34	1.08	0.73	0.85	0.97
5	Sumbawa Barat	1.07	1.20	1.01	1.20	1.11	1.12
6	Dompu	0.95	1.11	1.00	0.38	1.42	0.97
7	Bima	0.96	1.03	1.02	0.96	1.10	1.01
8	Lombok Utara	0.87	0.88	1.05	0.58	1.10	0.90
9	Kota Bima	0.97	1.23	0.99	0.48	1.01	0.94
10	Kota Mataram	1.57	1.12	0.83	0.39	2.09	1.20

Sumber : Data berbagai sumber diolah

Indikator kinerja sektor publik (PSP) tahun 2016 antar daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat menunjukkan variasi dengan varian yang tidak terlalu besar. Daerah kabupaten/kota yang memiliki total nilai indikator kinerja sektor publik (PSP) paling tinggi adalah Kota Mataram disusul oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan daerah kabupaten/kota dengan total nilai indikator kinerja sektor publik (PSP) terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan nilai sub-sub indikator, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kabupaten/kota dengan nilai sub indikator pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat, sementara sub indikator pendidikan terendah adalah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten/Kota dengan sub indikator kesehatan tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa dan nilai sub indikator kesehatan terendah adalah Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten/Kota dengan sub indikator distribusi tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten/Kota dengan sub indikator stabilitas tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat dan sub indikator stabilitas terendah adalah Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten/Kota dengan sub indikator kinerja ekonomi tertinggi adalah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dan sub indikator kinerja ekonomi terendah adalah Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 4. Public Sector Performance (PSP) Indikator di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.**

No	Kab/Kota	Sosial indikator		Musgravian Indikator			PSP
		Pendidikan	Kesehatan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Lombok Barat	1.94	1.82	0.88	0.11	2.13	1.38
2	Lombok Tengah	1.19	1.03	1.04	0.09	1.36	0.94
3	Lombok Timur	1.47	0.81	0.74	0.55	1.57	1.03
4	Sumbawa	0.94	0.82	1.21	0.73	0.71	0.88
5	Sumbawa Barat	1.04	1.20	0.97	1.20	1.05	1.09
6	Dompu	0.90	1.05	1.03	0.38	1.56	0.98
7	Bima	0.87	1.06	0.96	0.96	1.04	0.98
8	Lombok Utara	0.87	1.06	1.11	0.58	0.77	0.88
9	Kota Bima	0.92	1.47	1.08	0.48	1.02	0.99
10	Kota Mataram	1.55	1.16	0.89	0.39	1.93	1.18

Sumber : Data berbagai sumber diolah

## 2. Public Sektor Efficiency (PSE)

Nilai indikator Efisiensi Sektor Publik (PSE) di masing-masing daerah dihitung dengan formulasi yang dijelaskan dalam metode. Hasil perhitungan data yang tersedia total nilai indikator dan nilai sub-sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Public Sector Efficiency (PSE) Indikator di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.**

No	Kab/Kota	Sosial indikator		Musgravian Indikator			PSE
		Pendidikan	Kesehatan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Lombok Barat	2.75	1.19	0.68	0.73	1.34	1.33
2	Lombok Tengah	1.20	1.27	0.76	0.73	0.95	0.98
3	Lombok Timur	0.56	0.34	1.46	1.49	1.63	1.10
4	Sumbawa	3.87	4.41	4.36	4.10	6.28	4.60
5	Sumbawa Barat	1.07	1.01	1.30	1.26	1.42	1.21
6	Dompu	0.43	0.75	0.61	0.60	0.87	0.65
7	Bima	1.37	1.46	1.34	1.30	1.46	1.39
8	Lombok Utara	0.52	3.33	1.45	1.36	1.52	1.63
9	Kota Bima	0.89	2.07	0.82	0.81	0.83	1.08
10	Kota Mataram	7.09	9.40	1.35	1.47	1.59	4.20

Sumber : Data berbagai sumber diolah

Indikator total Efisiensi Sektor Publik (Public Sector Efficiency = PSE) tahun 2016 antar kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat bervariasi. Kabupaten/ Kota yang memiliki indikator total nilai Public Sector Efficiency (PSE) paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram disusul oleh Kabupaten

Lombok Utara. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan total indikator Public Sector Efficiency (PSE) terendah adalah Kabupaten Dompu.

Berdasarkan nilai sub-sub indikator, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota dengan PSE sub indikator pendidikan tertinggi adalah Kota Mataram disusul Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat, sementara sub indikator pendidikan terendah adalah Kabupaten Dompu. Kabupaten/Kota dengan sub indikator kesehatan tertinggi adalah Kota Mataram kemudian disusul berturut-turut Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Utara, sementara nilai sub indikator kesehatan terendah adalah Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten/Kota dengan sub indikator distribusi tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten/Kota dengan sub indikator stabilitas tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa dan nilai sub indikator stabilitas terendah adalah Kabupaten Dompu. Kabupaten/Kota dengan sub indikator kinerja ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa dan sub indikator kinerja ekonomi terendah adalah Kota Bima.

**Tabel 6. Public Sector Efficiency (PSE) Indikator di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.**

No	Kab/Kota	Sosial indikator		Musgravian Indikator			PSE
		Pendidikan	Kesehatan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Lombok Barat	2.40	1.38	0.69	0.88	1.66	1.40
2	Lombok Tengah	0.23	0.33	0.49	0.77	0.72	0.51
3	Lombok Timur	2.54	0.85	1.97	1.90	2.26	1.90
4	Sumbawa	4.23	6.22	0.99	0.48	1.26	2.64
5	Sumbawa Barat	0.51	0.49	0.80	7.05	1.56	2.08
6	Dompu	0.81	0.38	0.99	0.42	1.42	0.80
7	Bima	1.94	1.18	1.33	1.33	1.45	1.45
8	Lombok Utara	0.84	5.12	1.50	0.79	1.05	1.85
9	Kota Bima	1.48	3.24	0.98	0.43	0.93	1.41
10	Kota Mataram	5.24	14.56	1.32	2.60	1.93	5.13

Sumber : Data berbagai sumber diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan data yang tersedia hasil perhitungan indikator kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat melalui model pengukuran *Public*

*Sector Performance (PSP)* dan *Public Sector Efficiency (PSE)*, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja sektor publik (*Public Sector Performance*) tahun 2016 antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat bervariasi. Kabupaten/Kota yang memiliki total nilai indikator kinerja sektor publik (PSP) paling tinggi adalah Kota Mataram disusul oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan daerah kabupaten/kota dengan total indikator kinerja sektor publik (PSP) terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Kabupaten/Kota yang memiliki total indikator *Public Sector Efficiency (PSE)* paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram disusul oleh Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan total indikator *Public Sector Efficiency (PSE)* terendah adalah Kabupaten Dompu.
3. *Public Sector Performance (PSP)* menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRBnya tinggi belum menjamin akan mencapai nilai indikator PSP yang tinggi. Demikian juga dengan indikator *Public Sector Efficiency (PSE)* bahwa kabupaten/kota dengan proporsi pengeluaran pemerintah yang tinggi belum menunjukkan hasil yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

#### **Saran**

Rekomendasi kebijakan yang diajukan berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya adalah :

1. Pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja modal lebih diarahkan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan strategis.
2. Sejalan dengan hal tersebut maka pengeluaran pemerintah harus terarah pada program pembangunan peningkatan pelayanan publik dan senantiasa menunjukkan peningkatan pada setiap tahun anggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Antonis., dkk. 2008. *Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Evidence from OCED Countries*.
- Afonso, Antonio, L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). "Public Sector Efficiency: An International Comparison", *Public Choice*, 123 (3-4), 321 – 47
- Bastisn, Indra. 2006. *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

- Bird, R. and Rodriguez, E. R.. 1999. *Decentralization and poverty alleviation. International experience and the case of the Philippines*. *Public Admin. Dev.*, 19: 299-319.
- Guritno Mangkusubroto. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta BPFE – UGM.
- Hakimudin, Dimas Rizal, 2010, Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2007.
- Kurnia, Akhmad Syakir, 2010. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.11, No.1:1-20.
- Machfud Sidik. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Dirjen PKPD DepKeu R.I. Jakarta.
- Mankiw, Gregory., 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore, Mc. Graw-Hill Book Co.
- Stiglitz, Joseph E. 2003. *Economics of the Public Sector*, Third Edition, Norton McGraw-Hill.
- Zehavi A., Rosen D. 1989. A new species of Aphelinus (Hymenoptera: Aphelinidae) from Israel, with notes on the mali group. *Israel Journal of Entomology*
- Von Braun, J. and U. Grote. 2002. *Does Decentralization Serve the Poor? In Managing Fiscal Decentralization ed. E. Ahmad, and V. Tanzi*. London and New York: Routledge.



# Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik Di Kabuapen/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://abstraksiekonomi.blogspot.com">abstraksiekonomi.blogspot.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://journal.stieamkop.ac.id">journal.stieamkop.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://dikes.sumbawakab.go.id">dikes.sumbawakab.go.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.bastamanography.id">www.bastamanography.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://www.depkes.go.id">www.depkes.go.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://bapelitbangda.batam.go.id">bapelitbangda.batam.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://assirojiyyahdaon.wordpress.com">assirojiyyahdaon.wordpress.com</a> Internet Source	1%

10 Bahjatun Nadrati, Wisnu Probo Wijayanto, Musniati Musniati. "GAMBARAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) SANTRI DI PONDOK PESANTREN AD DIINUL QOYYIM LOMBOK BARAT", HOLISTIK JURNAL KESEHATAN, 2019  
Publication 1 %

---

11 [bappeda.ntbprov.go.id](http://bappeda.ntbprov.go.id)  
Internet Source 1 %

---

12 [e-renggar.kemkes.go.id](http://e-renggar.kemkes.go.id)  
Internet Source 1 %

---

13 [repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id)  
Internet Source 1 %

---

14 [yutimahdamazier.blogspot.com](http://yutimahdamazier.blogspot.com)  
Internet Source 1 %

---

15 [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)  
Internet Source 1 %

---

16 [lppm.umgo.ac.id](http://lppm.umgo.ac.id)  
Internet Source 1 %

---

17 [repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)  
Internet Source 1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On

# Kinerja Dan Efisiensi Sektor Publik Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---